



Prosiding Seminar Nasional Manajemen

Vol 3 (2) 2024: 893-899

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index>

ISSN: 2830-7747; e-ISSN: 2830-5353



Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penelitian Kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2021

Azrila Salsabila¹, Dinda Fitriani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang

*Corresponding author: e-mail: azrilasalsabila82@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Diterima April 2024 Disetujui Mei 2024 Diterbitkan Juni 2024</p> | <p>Penelitian bertujuan menganalisis rasio keuangan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan berupa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2020 – 2021. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio kemandirian Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencakupi kebutuhan akan daerahnya. Rasio pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun kadang terjadi penurunan pada pendapatan. Dengan begitu kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil karena mampu mempertahankan keberhasilan yang dicapai dalam periode tahun 2020-2021. Penulis menyarankan agar Provinsi DKI Jakarta menjalankan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan sarana dan prasarana ekonomi dimasa yang akan datang.</p> |
| <p>Kata Kunci: Rasio keuangan; Efektivitas; pertumbuhan</p> | <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to analyze financial ratios in the DKI Jakarta Provincial APBD in managing regional finances. This study uses a quantitative descriptive analysis technique. The type of data used is in the form of regional financial accountability reports (APBD) for the 2020-2021 fiscal year. While the analysis of financial ratios used in this study is in the form of ratios of independence, ratios of effectiveness and efficiency of Local Own Revenue, compatibility ratios, and growth ratios. The results of the calculation of the independence ratio for DKI Jakarta Province for the 2020-2021 Fiscal Year show that the regional financial independence of DKI Jakarta Province can be said to be completely independent in meeting</i></p> |
| <p>Keywords: Financial, Ratios, Effectiveness, Growth</p> | |

the needs of its region. For the regional government budget growth ratio of the DKI Jakarta Province, on average, it has shown positive growth, although sometimes there has been a decline in income. In this way, the performance of the DKI Jakarta Provincial Government can be said to be successful because it is able to maintain and increase the success achieved in the 2020-2021 period. The author suggests that DKI Jakarta Province implement the applicable laws and regulations which will ultimately affect the development of economic facilities and infrastructure for the wider community in the future.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada tahun 1999 mulai diberlakukan otonomi daerah, dikarenakan hal ini pemerintah daerah memasuki daerah memasuki fase baru dalam system pemerintahan. Di masa orde reformasi yang dimulai pada sejak tahun 1998 menurut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional.

Bedasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan realisasi keuangan entitas pelapor yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran pada periode tertentu.
2. Laporkan kecenderungan kelebihan saldo anggaran.
Laporan Perubahan Kelebihan Saldo Anggaran . Berisi informasi mengenai kenaikan dan penurunan kelebihan saldo anggaran tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pelapor ditinjau dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional memberikan gambaran mengenai rekapitalisasi sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah dan pemanfaatannya untuk kegiatan yang dikelola pemerintah selama periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus keluar pada suatu periode tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pada aset non-keuangan, aset keuangan dan non-keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Memuat informasi mengenai perubahan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Pelaporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan informasi mengenai pos-pos pelaporan keuangan dalam kerangka pengungkapan yang tepat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. CaLK juga menjelaskan penerapan tujuan kinerja keuangan dan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Berisi uraian realisasi

Pada tahun anggaran 2020, LKPD DKI Jakarta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski demikian, Baharullah Akbar mengatakan BPK masih mengidentifikasi beberapa permasalahan yang tidak terlalu mempengaruhi kewajaran penggambaran LKPD. “Tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai Pemprov DKI Jakarta, BPK tetap mengemukakan beberapa permasalahan yang tidak terlalu mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD, namun masih memerlukan perhatian untuk perbaikan ke depan.” Selain itu, Anggota BPK menjelaskan, bersamaan dengan pemeriksaan LHP-LKPD, BPK juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemprov DKI terkait program perumahan rakyat. Inspeksi ini merupakan tinjauan kinerja penyediaan unit rumah terjangkau dan berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama tahun anggaran 2018-2020. Berdasarkan hasil sidak, Pak Baharullah menegaskan, upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan unit rumah kepada MBR masih perlu ditingkatkan mengingat ada permasalahan serius. Permasalahan tersebut juga termasuk yang muncul pada rumah yang sudah dibangun, yakni Kondisi perumahan tidak sesuai, tipe perumahan yang tersedia tidak memenuhi syarat MBR, akses kepemilikan rumah milik/sewa terbatas (RSM/S). Kasus ini belum terselesaikan. Untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah, BPK juga merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta. IHPD ini berisi rangkuman hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 di beberapa satuan kerja di lingkungan Pemprov DKI, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta (BPK RI, 2021).

Sehubungan dengan fenomena tersebut di atas, perlu dilakukan upaya untuk menjaga laju pembangunan daerah agar lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penggalan dan memaksimalkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah yang ditargetkan. Pengelolaan yang baik dan efektif memerlukan pengembangan kemampuan pemantauan dan sistem pengendalian secara sistematis. Tentunya hal ini memerlukan berbagai informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Untuk mencapai hal ini diperlukan penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Analisis Keuangan

Analisis keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan berdasarkan laporan yang ada. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut (Sujarweni, 2017) analisis laporan keuangan adalah upaya untuk menganalisis kondisi keuangan entitas hingga saat ini dan mengestimasi pada waktu ke depan. Perihal analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan yang paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dan menurut (Halim & Kusufi, 2012) penilaian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan. Selanjutnya (Marsela, Soselia, Nigrum, Pangestu, Lero, & Kristanti, 2023) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintahan dengan menggunakan rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Maluku dalam hal tingkat kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan pengelolaan yang sangat

efektif, efisien, rasio aktivitas yang belum seimbang antara belanja operasi dengan belanja modal, dan pertumbuhan yang sangat rendah.

Kemudian hasil penelitian (Siregar & Marjana, 2020) bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kota Depok jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan cukup dikarenakan karena rata-rata rasio nya masih berada di interval 30,1% - 40,00%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan sedang karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena rata-rata efektivitas nya sudah melebihi 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai cukup efisien karena masih berada pada interval 80%-90%. Rasio keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi kecil.

Sedangkan (Amal & Wibowo, 2022) mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19. Dan (Fathah, 2017) mengemukakan dalam penelitiannya menunjukkan keuangan kinerja Kabupaten Gunungkidul dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan efektif, karena efektivitasnya rata-rata sebesar 131,8% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien karena besarnya rata-rata rasio ini sebesar 109,8%. (3) Rasio Kesesuaian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan paling banyak dari anggarannya untuk belanja operasional daerah yang rata-rata sebesar 71,26% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 9,92%. (4) Rasio Pendapatan Pertumbuhan, Pendapatan, Pengeluaran Operasional selalu meningkat dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal adalah volatile (5) Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena rasio rata-rata 10%.

B. Penerapan Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Penggunaan analisis rasio pada sektor public khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur dan demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keselarasan, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021. Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Adapun metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari website resmi PPID DKI Jakarta yaitu mengenai laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Efektivitas PAD
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi, misi dan Sasaran Biro Keuangan

Visi

- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi secara optional

Misi

1. Pemberdayaan aparatur secara optimal;
2. Menciptakan dan mempertahankan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah;
3. Meyempurnakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Menerapkan Sistem Akuntansi Pengendalian Anggaran;
5. Melaksanakan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Bidang Keuangan Ke lima Wilayah Kota dan Satu Kabupaten Administratif.

Sasaran Strategis

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Restrukturisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Standarisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Pelaksanaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabilitas
5. Peningkatan Pelayanan Menuju Pelayanan Prima
6. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah
7. Pengalokasian Dana Secara Proporsional
8. Pendelegasian Wewenang Daerah

Untuk perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 1 Perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021

| No | Pendapatan | 2020 | 2021 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | PAD (Pendapatan Asli Daerah) | 37.414.754.711.193 | 41.606.307.405.630 |
| 2 | Dana Perimbangan | 16.897.722.313.632 | 22.630.423.484.052 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Bantuan) | 1.509.350.237.902 | 1.286.907.449.318 |
| a. Jumlah Pendapatan APBD (1+2+3) | | 55.821.827.362.737 | 65.523.638.339.000 |

| NO | Pendapatan | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 43.835.699.863.256 | 53.925.743.776.335 |
| 2 | Belanja Modal | 3.173.223.520.882 | 6.865.827.016.719 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 4.707.937.545.524 | 439.889.457.199 |
| b. Jumlah Belanja APBD | | 51.716.860.929.662 | 61.231.460.250.253 |
| Surplus (a-b) | | 4.105.966.433.075 | 4.292.178.088.747 |

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

PAD: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

Rasio kemandirian pemprov DKI Jakarta dalam mencakupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat mencapai 67,03%

pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 rasio kemandirian pemprov DKI Jakarta mencapai 63,50%, sehingga pemprov DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan daerahnya.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Peendapatan Asli Daerah

Tabel 2 Biaya, Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Dispenda Provinsi DKI Jakarta

| No | Keterangan | Tahun Anggaran 2020 | | Tahun Anggaran 2021 | |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | PAD | 32.480.000.000.000 | 31.895.263.277.623 | 37.215.000.000.000 | 34.575.563.219.175 |
| 2 | Retribusi Daerah | 468.413.750.000 | 496.332.944.408 | 755.755.000.000 | 383.859.710.282 |
| | Jumlah | 32.948.413.750.000 | 32.391.596.222.031 | 37.970.755.000.000 | 34.959.422.929.457 |
| | Jumlah Belanja (Modal) | - | 3.173.223.520.882 | - | 6.865.827.016.719 |
| | Rasio Efektivitas | - | 0,98 | - | 0,92 |
| | Rasio Efisiensi | - | 0,1 | - | 0,2 |

Sumber Data : Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2020-2021

Rasio Efektivitas pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan PAD tahun 2020 mencapai 98% dan tahun 2021 mencapai 92%. Hal ini membuktikan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan belum efektif, karena rasio yang dicapai belum memenuhi batas minimal sebesar 1 atau 100%. Karena APBD yang telah dianggarkan pemprov DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan realisasinya maka persentase rasio tidak mencapai 100%. Sedangkan untuk menghitung rasio efisiensi tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar 10%-20%, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan pendapatan yang ada di pemprov DKI dapat dikatakan efisien. Efisien dapat dikatakan apabila, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah pemprov semakin baik.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana nya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Dan rasio keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian rumus rasio belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan**Tabel 3 Rasio Perhitungan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021**

(Dalam Rupiah)

| No. | Keterangan | 2020 | 2021 |
|-----|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | PAD | 7.817.545.125.277,53 | 8.198.961.140.384,85 |
| 2 | Pertumbuhan PAD | - | 4,88% |
| 3 | Total Pendapatan | 14.337.618.501,100,53 | 13.892.169.205.048, 85 |
| 4 | Pertumbuhan Pendapatan | - | (3,11%) |
| 5 | Belanja Rutin | 5.025.977.951.358,80 | 5.520.797.189.413,00 |
| 6 | Pertumbuhan Belanja Rutin | - | 9,85% |
| 7 | Belanja Pembangunan | 10.135.99.844.847,00 | 12.401.241,742.664,00 |
| 8 | Perusahaan Belanja Bangunan | - | 22,35% |

Sumber Data : Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021

Pada tabel 3 bisa disimpulkan bahwa hasil masing-masing analisis rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut: Untuk analisis rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan persentase sebesar 4,88%, analisis rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan persentase sebesar 3,11%, analisis rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan persentase sebesar 9,85%, dan analisis rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami persentase kenaikan sebesar 22,35

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari rasio Efektifitas PAD dalam merealisasikan PAD tahun 2020 mencapai 98% dan tahun 2021 mencapai 92%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan Daerah yaitu rasio efisiensi tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar 10%-20%, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan pendapatan yang ada di pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan efisien. Efisien dapat dikatakan apabila, semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemprov semakin baik.
3. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian yaitu Rasio Belanja Operasi Pemprov DKI dari tahun 2020 -2021 mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebesar 85% menjadi 88% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2011 menjadi 71,49%, dan pada tahun 2012 turun menjadi 71,12%. Kenaikan rasio belanja operasi di Pemprov DKI tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3% per tahun.
4. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif yaitu rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan persentase sebesar 4,88%, analisis rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan persentase sebesar 3,11%, analisis rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan persentase sebesar 9,85%, dan analisis rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami persentase kenaikan sebesar 22,35%.
5. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu kemandirian pemprov DKI Jakarta dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat mencapai 67,03 % pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 Rasio kemandirian pemprov DKI mencapai 63,50% ,sehingga pemrov DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan daerahnya.

REFERENSI

- Amal, M. I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4.*, 83-93.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK ▪ Vol.8 ▪ No. 1* , 33 - 48., 33 - 48.
- Halim, A. &. (2012). Akuntansi Sektor publik. *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Halim, A. &. (2018). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . *Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* . Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Marsela, D. S. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *JRAK volum 19, 1- 16*, 1- 16.
- Mira Deliana, K. (2017). *Analisis Raso Keuangan Pemprov DKI jakarta.*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok - Jawa Barat. *Journal IMAGE | Volume 9*, 1-19.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Sujarweni, V. W. (2017). Analisis Laporan Keuangan : Teori, aplikasi, & hasil penelittian*. Yogyakarta: Pustaka baru press.